



Peran PKK dalam Penanganan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri Tahun 2023

Vainels Krisna Lenta Lawolo
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
vainelslawolo39157@gmail.com

Abstrak

The role of PKK in handling stunting in Bangsongan Village, Kayen Kidul, Kediri Regency is implemented through a community empowerment program. The causes of stunting in Bangsongan Village are due to economic factors, parenting patterns, lack of knowledge about stunting, poor nutrition, and poor environmental sanitation. The purpose of this study is to find out what community empowerment programs have been implemented, supporting and inhibiting factors, and to find out the role of the village government as a public policy provider. This PKK activity was successful with high participation from the community, collaboration with multisectors and village government to support the stunting reduction program. Although the obstacle to the PKK's role is the lack of allocated funds issued by the village government. The PKK program has succeeded in reducing stunting sufferers to 11%, and the community understands about healthy living, and is able to increase community food security.

Keywords: *Community Empowerment, PKK, Handling Stunting*

Riwayat Artikel:

Masuk: 13 September 2024 | Revisi: 07 November 2024 | Diterima: 25 November 2024 |
Diterbitkan: 1 Desember 2024



Pendahuluan

Stunting adalah terjadinya permasalahan terhadap tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan adanya infeksi yang menghambat anak untuk bertumbuh seperti anak seusianya. Pemenuhan gizi ibu dan status kesehatan sangat penting karena menjadi penentu stunting, apabila tidak terpenuhi maka akan mungkin melahirkan anak terhambat, membiarkan adanya gizi buruk dan dampaknya kemiskinan bagi diri sendiri dan negara (Unicef Indonesia, 2013). Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting dilihat dari dua aspek yaitu berdasarkan jangka pendek adanya gangguan perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, mudah sakit, bersiko mengalami penyakit diabetes, obesitas, dan penyakit lainnya.

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu permasalahan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Sesuai dengan amanat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, apabila amanat tersebut dilaksanakan dan diterapkan dalam program penanganan stunting sehingga angka stunting di Indonesia dapat menjadi rendah. Penyebaran stunting di setiap provinsi memiliki total 884.037 (pendek), 288.065 (sangat pendek) dengan persentase kasus stunting secara keseluruhan 7.1 % (Negeri, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber



dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam melakukan kebijakan PMT, program perlindungan sosial, promotif edukasi melalui sosialisasi bagi masyarakat, menghimbau program Keluarga Berencana (KB) yang dananya dialokasikan sebesar Rp 44,8 triliun pada 2022. Anggaran itu terdiri dari belanja yang tersebar di 17 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 34,1 triliun serta pemerintah daerah (pemda) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 8,9 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp 1,8 triliun (Saptohutomo, 2022).

Desa menjadi pilar utama untuk memutus angka stunting ssebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014. Salah-satu kelembagaan yang berperan dalam desa adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). yang berfokus pada pembangunan masyarakat, dalam prosesnya pembangunan tersebut tumbuh dari bawah yaitu dari masyarakat itu sendiri, lahir atas kesadaran dan inisiasi masyarakat, pelaksanaannya dijalankan oleh, dari dan untuk masyarakat. Kabupaten Kediri berada di posisi ke 14 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri kasus stunting di Kediri mengalami penurunan dari 13,55% menjadi 9,2%. (Kediri, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, 2023). Kecamatan Kayen Kidul turut mengambil peran untuk memanfaatkan akomodasi yang diberikan kepada 12 desa yang ada. Salah satunya adalah Desa Bangsongan yang aktif dalam memberdayakan masyarakat untuk menangani permasalahan stunting.

Permasalahan stunting di Desa Bangsongan merupakan prioritas pemerintahan desa dalam menggunakan dana desa. Hal ini, dikarenakan dari tahun 2022 adanya peningkatan penderita stunting di kalangan masyarakat berdasarkan data-data posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai resiko dari stunting menjadi indikator permasalahan. PKK Desa Bangsongan memberikan



peran dengan cara melakukan pendampingan terhadap keluarga yang persiapan punya anak, sedang hamil, dan memberikan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran keluarga terhadap penyakit stunting. Pendataan terhadap bayi/balita terdampak stunting akan diberikan penyuluhan serta bersama dengan Puskesmas Desa Bangsongan melalui program PMT, posyandu, dan demo masak. Berdasarkan pernyataan Bidan Desa Bangsongan bahwa angka penderita stunting di Bangsongan adalah 11% pada tahun 2023. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanganan awal stunting. Hal ini bisa dilihat dari terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai stunting. Kurangnya sarana dan prasarana untuk program pencegahan stunting. Hal ini dikarenakan berdasarkan observasi peneliti tempat pelaksanaan program masih menggunakan gedung pemerintahan desa. Tidak maksimalnya pendampingan dari instansi pemerintahan sehingga kurangnya koordinasi maupun evaluasi penyusunan program penanganan stunting.

PKK aktif dan cukup berhasil dalam mengelola permasalahan stunting dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dukungan dari pemerintahan desa terhadap kegiatan-kegiatan rutin terkait stunting mampu menciptakan komitmen PKK mengentaskan stunting. Pemahaman mengenai akar penyebaran stunting di Desa Bangsongan, dan peran dari puskesmas di Desa Bangsongan membentuk sinergitas penanganan stunting terhadap masyarakat desa agar terlibat menurunnya angka stunting di desa.

Metode

Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian studi kasus untuk mengidentifikasi kasus dan informasi yang dipelajari melalui



dalam bentuk pertanyaan. Sehingga memberikan gambaran secara intensif terhadap kasus permasalahan stunting yang ada di Desa Bangsongan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PKK Desa Bangsongan pada tahun 2023. Fokus dalam penelitian adalah peran PKK dalam penanganan stunting melalui 4 program yang telah terlaksana selama periode 2023 dengan adanya dukungan dana desa, dan beberapa lembaga terkait yang turut membersamai kegiatan PKK. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan teknik *Non-Probability Sampling*. Kepada 11 responden Informan yang dipilih oleh peneliti berdasarkan perwakilan dari keseluruhan sektor di desa berdasarkan jabatan, dan gender yang diwakili dari pemerintahan desa, kepengurusan PKK, bidan desa, pendamping desa, ketua RT/RW, masyarakat umum, dan keluarga yang anaknya terdampak stunting. Untuk itu peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi, serta melalui penelusuran dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

Desa Bangsongan adalah desa yang terletak di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bangsongan adalah petani. Bangsongan dibagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Gerdu, Dusun Bangsongan, dan Dusun Koripan. Desa Bangsongan merupakan wilayah kedua di Kecamatan Kayen Kidul dengan luas kurang lebih 373 hektar. Desa Bangsongan dibatasi oleh empat wilayah desa yaitu sebelah utara desa Kwaron, sebelah selatan desa Baye, sebelah timur desa Senden, dan sebelah barat desa Purwotengah. Berdasarkan informasi dari pemerintahan Desa



Bangsongan pada tahun 2023, tertera bahwa penduduk Desa Bangsongan berjumlah 6.973 jiwa, dengan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki berjumlah 3.495 orang, dan perempuan berjumlah 3.442 orang

Pendapatan Desa Bangsongan berdasarkan realisasi APBDes tahun 2023 sebesar 686.582.500,00 juta rupiah (Sekretaris Desa Bangsongan, 2024). Mayoritas penduduk di Desa Bangsongan adalah penduduk asli, dan transmigran yang mempengaruhi keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat. Dari 6 agama yang diakui oleh negara, ada dua agama yang tidak ada penganutnya di Bangsongan yaitu agama Konghucu dan agama Buddha. melalui survei desa di tahun 2023 menyatakan bahwa mayoritas masyarakat masih bekerja dan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan kriteria lainnya. Angaktana kerja di Bangsongan laki-laki 1.922, dan perempuan 1.888. Desa Bangsongan sebagian besar masih berada di sektor pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan dalam bidang ekonomi masyarakat. Sebagai karyawan perusahaan swasta menjadi sektor yang paling terbanyak dijadikan pekerjaan oleh penduduk Bangsongan namun, tidak di lingkungan desa melainkan merantau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada kategori paling sedikit pekerjaan yaitu dibidang kesehatan, di mana masih kurangnya minat masyarakat bekerja sebagai tenaga kesehatan dengan dibuktikan rendahnya jumlah jiwa yang berprofesi dibidang tersebut.

Keluarga pra sejahtera berjumlah 624 KK, keluarga sejahtera I 188, keluarga sejahtera II 189, keluarga sejahtera III 189, keluarga sejahtera III plus 931. pendidikan masyarakat Desa Bangsongan rata-rata berpendidikan lebih banyak tamatan SMA sebanyak 1.780 jiwa, dan paling sedikit tamatan tingkat pendidikan sarjana strata 3 sebanyak 5 jiwa. Pendidikan masyarakat yang rendah di Desa Bangsongan



mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memahami permasalahan stunting dan berpartisipasi dalam program penurunan prevalensi angka stunting di Bangsongan. Desa Bangsongan memiliki gedung sekolah dan gedung kesehatan yang menunjang pendidikan masyarakat.

Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini, terdapat 11 orang informan yang terdiri dari pemerintahan desa, PKK, tenaga kesehatan desa, dan masyarakat di Desa Bangsongan, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Kesebelas informan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Nama	Jabatan	Landasan
1	1. Supardi S.Pd 2. Dewi Firda	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat desa	Pemimpin pemerintahan desa, dan pengurus bidang kerja pemerintahan desa
2	1. Erna Ningsih 2. Elmina Yudha Larent	Kepengurusan PKK	Pelaksana Program Penanganan Stunting desa
3	1. Rina	Bidan Desa	Pelayan Kesehatan Desa
4	1. Andika	Pendamping Desa	Fasilitator Pelaksana Program Stunting
5	1. Samsul 2. Zainal	Ketua RT/RW	Perwakilan Masyarakat
6	1. Sunarto	Masyarakat umum	Perwakilan Masyarakat
7	1. Riska Wahyu 2. Anis	Keluarga anak yang stunting	Perwakilan Keluarga Terdampak Stunting

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023



Landasan Terjadinya Stunting di Desa Bangsongan

Penelitian ini berfokus terhadap kasus stunting yang ada di Desa Bangsongan karena stunting mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sekarang dan yang akan datang. Gizi balita terpenuhi maka pertumbuhan dan perkembangan akan baik. Kelompok anak balita menjadi salah satu yang rentan mengalami permasalahan gizi, dan yang banyak dialami adalah stunting (Amin N.A & Julia, 2014). Hingga saat ini, stunting menjadi permasalahan kesehatan yang berkembang di Indonesia. Desa Bangsongan menjadi salah satu desa yang terdampak stunting.

Peran pemerintahan desa dan PKK berpotensi mampu menangani permasalahan ini. Penyebab stunting berdasarkan hasil wawancara dari informan bahwa penyebab stunting yang terjadi di masyarakat Desa Bangsongan adalah karena kekurangan gizi di saat masih di dalam kandungan, pola asuh yang belum dipahami oleh orang tua anak, masih ada kebiasaan masyarakat yang kurang bersih terhadap lingkungannya, mengabaikan kesehatan anak dengan tidak percaya kepada tenaga kesehatan yang ada di desa, dan faktor perekonomian yang membuat keluarga anak yang terdampak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sehingga dari penyebab penyebab ini menjadi landasan untuk peran PKK dalam melakukan pemberdayaan terhadap penanganan stunting yang ada di desa Bangsongan.

Berdasarkan penyebab adanya stunting di Bangsongan berpotensi menjadi landasan untuk peran PKK dalam melakukan pemberdayaan terhadap penanganan stunting yang ada di Desa Bangsongan. Dalam hal ini gerakan PKK dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan melakukan pengelolaan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang menuju keluarga yang sehat sejahtera, maju, setara dan adil, serta memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungannya (Ani W. Soetjipto, 2010, p. 51).



Dengan demikian, melalui pemberdayaan penting bagi keberhasilan yang signifikan terhadap penurunan angka stunting. Menurut (Suharto, 2005) pemberdayaan yang dilakukan harus mencari dasar/persepsi mengenai permasalahan yang dihadapi mengenai kebutuhan sendiri agar memiliki dasar perencanaan pada sektor kesehatan. Mengidentifikasi penyebab permasalahan secara komprehensif dengan adanya indikator yang tepat. Penyebab stunting dirumuskan sebagai proses perencanaan program yang berkaitan dengan asesmen kebutuhan masyarakat untuk diimplementasikan melalui program kegiatan.

Peran PKK Dalam Penanganan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat

PKK melakukan kegiatan posyandu yang dilaksanakan dua kali dalam sebulan di pos posyandu desa. Pada kegiatan posyandu PKK mengadakan pemeriksaan kesehatan anak dan ibu hamil, melakukan kunjungan ke rumah masyarakat yang tidak bisa hadir pada pelaksanaan posyandu, pemberian makanan bagi keluarga miskin yang pendanaannya dari kecamatan, untuk keluarga yang rentan miskin untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang terdaftar di data posyandu, dan mendampingi keluarga yang anaknya menderita sakit untuk dibantu akses kesehatannya, dan PKK membantu membawa ke puskesmas yang ada di Desa Bangsongan.

Kegiatan posyandu dilakukan bukan hanya untuk anak balita tapi terhadap ibu hamil untuk mengetahui perkembangan anak, dan mencegah terjadinya potensi stunting dalam kandungan. Posyandu memberikan data-data yang dibutuhkan PKK dalam mengklasifikasikan anak-anak yang akan menerima stunting, dan anak-anak yang sudah bisa diluluskan dari stunting. Kader posyandu mendapatkan pelatihan berkelanjutan dalam pendataan anak-anak stunting, pertumbuhan anak, deteksi masalah, dan



konseling. Hal ini, dilakukan untuk menguatkan pengetahuan dari PKK dalam memberikan pelayanan dan membimbing masyarakat.

PKK Bangsongan melakukan pendampingan rutin yang diharapkan dapat menjangkau secara setara masyarakat untuk mendapatkan penanganan yang sama dengan masyarakat lainnya. Dengan adanya dukungan dari tenaga kesehatan yaitu puskesmas sebagai koordinator dalam mendukung posyandu menjalankan tugasnya sehingga stunting di Desa Bangsongan dapat diketahui penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa. PKK Desa Bangsongan melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam upaya pentingnya pencegahan stunting di masyarakat secara keseluruhan di balai desa pada bulan Mei 2023. Sosialisasi tentang stunting dilaksanakan oleh PKK bersama dengan tenaga kerja kesehatan dari Puskesmas Desa Bangsongan dalam penyampaian materi terhadap masyarakat yang hadir. Sosialisasi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kesehatan anak-anak sehingga bisa tumbuh optimal. PKK juga mendemonstrasikan dukungan perubahan perilaku dalam memberikan makanan kepada anak, seperti mendorong ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan mengenalkan makanan pendamping ASI yang tepat.

PKK melakukan pemberian makanan tambahan (PMT), pelaksana program ini adalah PKK dengan dibantu oleh puskesmas desa untuk mengenalkan jenis makanan yang dimasak oleh tim PKK yang disesuaikan dengan standar gizi anak yang harus dikonsumsi. Pada kegiatan ini, PKK mendapatkan anggaran dari dana desa sebesar 60.000.000 juta yang dibagi dalam 3 kali pencairan dana selama periode pelaksanaan di tahun 2023. PMT diberikan secara langsung kepada orang tua yang anaknya stunting, dan diberikan juga ke rumah apabila orang tua anak tidak bisa datang untuk mengambil secara langsung. Program PMT diarahkan berdasarkan data kepada masyarakat yang



membutuhkan. Puskesmas desa merupakan salah dukungan besar bagi pelaksanaan PMT karena PKK Bangsongan membutuhkan validasi makanan yang diberikan tidak menimbulkan penyakit lainnya bagi anak-anak.

Kegiatan demo memasak adalah pelatihan pengelolaan bahan makanan lokal untuk ibu-ibu di Desa Bangsongan yang bertujuan untuk menangani stunting agar anak-anak mendapatkan pemenuhan gizi. Pada pelaksanaan kegiatan ini PKK bekerjasama dengan *Rose Brand* sebagai pihak yang membantu menyelenggarakan pelatihan dan menyediakan bahan pokok makanan untuk diberikan kepada para peserta kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara PKK bahwa pada pelaksanaan demo memasak, PKK menggunakan anggaran sebesar 6.000.000 juta yang diambil dari anggaran dana desa yang diberikan kepada PKK yang digunakan untuk pembelian bahan masakan selain yang diberikan oleh *Rose Brand*, dan untuk pemberian honor *cheff* yang membantu PKK. Pelatihan ini bisa mencakup penggunaan bahan pangan yang terjangkau dan mudah didapat di desa. kegiatan pelatihan memasak tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk memberdayakan diri secara ekonomi dan sosial

Peran Pemerintahan Desa Bangsongan Dalam Mendukung Penanganan Stunting

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Bangsongan, pemerintahan desa bersepakat menjadikan stunting menjadi program yang di prioritaskan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan di Bangsongan. PKK diberikan anggaran melalui dana desa yang disepakati pada saat MUSRENBANGDES bahwa kebijakan kesehatan yaitu pelaksanaan posyandu dengan dilengkapi administrasi, fasilitas yang dibutuhkan, pemberian PMT, dan pemberian honor kepada pengurus PKK melalui penggunaan



anggaran selama 12 bulan. Secara keseluruhan PKK diberikan anggaran sebesar 100.000.000 – 150.00.000 juta rupiah dan dana desa yang digunakan sebesar 60,000.000 juta rupiah khusus stunting (Pemerintahan Desa Bangsongan, 2023).

Pemerintah desa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tujuan dana desa dalam memprioritaskan permasalahan stunting. Hal ini tentunya ada pertemuan antara PKK dengan pemerintahan desa yang dibahas secara berkala berdasarkan penyebab stunting yang ada di desa. PKK juga menyampaikan benar adanya dukungan dari pemerintahan desa Bangsongan melalui pemberian anggaran, dan memfasilitasi transportasi, serta menjadi prioritas penggunaan dana desa. Sebagai lembaga desa PKK tetap dinaungi oleh pemerintahan desa yang programnya diatur oleh desa. Pemerintahan desa dan PKK selalu berkoordinasi untuk pelaksanaan kegiatan PKK Pelaksanaan program pemberdayaan untuk keluarga terdampak stunting mulai dibentuk pada tahun 2018, dan untuk realisasinya di tahun 2019 dan menjadi tahun awal pelaksanaan PKK yang menggunakan dana. Namun, pada tahun 2020 belum dilanjutkan pelaksanaan karena dialokasikan pendanaan ke BLT/BANSOS bagi masyarakat.

Dampak Program PKK

Peran PKK dalam penanganan stunting pada tahun 2023 memberikan dampak positif terhadap penurunan prevalensi angka stunting di Bangsongan. Adanya partisipasi masyarakat untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang dibuat untuk memanfaatkan potensi yang ada. Angka partisipasi masyarakat dalam program PKK cukup memuaskan dan memenuhi target partisipasi awal. Pada penanganan stunting di tahun 2023 terjadinya penurunan angka stunting menjadi 11% dari 37 menjadi 35 anak. Kegiatan PKK baru lebih dominan di tahun sebelumnya, sehingga menjadi awalan baik untuk kegiatan



ini bisa berlanjut di tahun 2024. PKK menargetkan pada tahun 2024 angka stunting bisa menyentuh 10% atau bisa di bawah angka tersebut sesuai dengan amanat dari Kabupaten Kediri untuk fokus pengentasan stunting hingga di bawah 10%.

PKK melakukan kegiatan yang membangun pemikiran masyarakat terhadap adanya stunting. Hal utama adalah adanya Puskesmas di dalam lingkungan desa yang secara komunikasi dan penanganan lebih cepat. Peran dari Puskesmas mulai dari mengajarkan PKK dan membantu proses pendataan dan kategorisasi anak stunting berimplikasi pada kerja sama tim penggerak yang baik. Dengan adanya pelatihan dan keterampilan dari PKK menyadarkan masyarakat bahwa adanya potensi SDM dan pangan menunjang pendapatan keluarga. Protein hewani seperti pembuatan kolam ikan lele bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di periode sebelumnya PKK memiliki kesulitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena yang diberikan adalah bahan mentah untuk dikelola, dan BLT/BANSOS yang langsung diberikan oleh PEMDES. Hal ini, menjadi evaluasi bagi PKK untuk mengubah program PKK yang tidak memberikan dana berupa uang namun, mengelola sehingga berimplikasi pada ketepatan sasaran.

Implikasi dari peran PKK adalah menyadarkan Pemerintahan Desa Bangsongan bahwa anggaran yang diberikan belum cukup untuk pelaksanaan kegiatan karena dari hasil wawancara dengan pengurus PKK menyatakan anggaran hanya untuk 20 anak sehingga adanya pembagian anggaran untuk memenuhi 15 anak lainnya. Dengan mengukur efektivitas program stunting berdasarkan konsep pemberdayaan Suharto melalui keempat program sudah mencapai keberhasilan berdasarkan adanya partisipasi masyarakat, terpenuhinya gizi dan kesehatan anak, adanya perubahan perilaku dan kesadaran dari masyarakat, adanya kolaborasi dan dukungan dari multi sektoral, dan kegiatan ini berdampak terhadap kemajuan desa untuk mencapai penurunan angka



stunting di bawah 10% ditahun berikutnya.

Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Peran PKK Dalam Program Stunting

Keberhasilan PKK pada kegiatan pelaksanaan posyandu karena adanya kepemimpinan dari ketua PKK yang mampu mengkoordinasikan kegiatan posyandu bersama pengurus PKK, adanya peran pemerintahan desa untuk memberikan prasarana/sarana yang dibutuhkan PKK di pos posyandu yang disediakan di setiap titik dusun. Pada kegiatan ini juga keterlibatan dari tenaga kesehatan yaitu Puskesmas yang mengawasi dan mengevaluasi data-data, sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap balita/bayi, dan ibu hamil yang datang ketika pelaksanaan posyandu. PKK juga dibekali dengan pelatihan agar bisa memahami tahapan dan cara pendataan survei stunting selama satu periode terlaksana. Partisipasi masyarakat menjadi pendukung agar terlaksananya kegiatan ini, dan adanya koordinasi dan keterlibatan multi sektoral yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. PKK, juga mengadakan posyandu di rumah keluarga yang anaknya stunting apabila memiliki kendala untuk bisa datang di pos posyandu, PKK akan memantau kesehatan anak secara bertahap.

Keberhasilan PKK dalam kegiatan sosialisasi karena PKK memiliki persiapan yang baik dengan mengikuti pelatihan kader PKK yang dilakukan agar bisa melaksanakan edukasi kepada masyarakat secara maksimal. PKK memberikan pengetahuan yang bisa dipahami cara penyampaiannya kepada masyarakat. Sosialisasi di sampaikan langsung oleh narasumber dari ahli gizi dan tenaga kesehatan Puskesmas Bangsongan. Hal lain, adanya dukungan dari tokoh agama yang membantu memanfaatkan kegiatan agama menginformasikan kapan pelaksanaan sosialisasi, sekaligus menghimbau masyarakat untuk menghadiri kegiatan. Tujuan sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan paham



akan stunting. PKK mengadakan pembagian waktu sosialisasi di masing-masing Dusun yang disesuaikan agar adanya partisipasi masyarakat untuk hadir. Pada kegiatan ini respon masyarakat mendukung memberikan asupan gizi yang cukup berdasarkan materi yang disampaikan. Faktor lainnya dengan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pada pemerataan pelaksanaan sosialisasi.

PKK dalam memberikan makanan tambahan (PMT) terlaksana dengan adanya dukungan Puskesmas memberikan pelatihan pemberian makanan yang bergizi kepada kader PKK. Pemerintahan desa yang memberikan anggaran dana desa sebesar 70.000.000 juta selama tahun 2023 untuk digunakan. Komitmen dari PKK yang selalu rutin memberikan PMT setiap minggunya dengan adanya pembagian 2 tahapan melalui PMT lokal dan PMT desa. Manfaat PMT mampu memenuhi gizi anak yang terdampak stunting. Peran orang tua dalam pemberian PMT memberikan pengaruh untuk asupan gizi anak, PKK akan mendatangi rumah keluarga agar PMT bisa didapatkan.

Pelaksanaan evaluasi pembagian PMT untuk mengetahui hal yang kurang dan yang harus diberikan.

Program demo memasak berhasil dilaksanakan karena adanya koperasi PKK yang membantu pendanaan program. Adanya pihak ketiga (Rose Brand) dalam memberikan pendanaan dan pelaksanaan. Ibu-ibu yang hadir memahami variasi pola makan yang bisa diberikan kepada anak sehingga menambah pengetahuan dan keterampilan memasak. Orang tua mampu berperan berimplikasi terhadap respon yang hadir mempraktekkan di rumah dan memberikan pola makan yang sesuai. Sehingga berhasil memberikan cara memasak yang benar bagi keluarga yang rentan miskin dan memanfaatkan pengelolaan hasil pertanian/perkebunan yang ada di sekitar.

Kegagalan dalam kegiatan posyandu dikarenakan kurangnya pengetahuan dan



kesadaran masyarakat, masih ada yang mempercayai mitos, ketika posyandu orang tua tidak mengantar anaknya untuk posyandu karena faktor pekerjaan. Pola asuh anak yang salah sehingga PKK terbebani karena kondisi anak yang berubah-ubah sehingga mempengaruhi kualitas tinggi badan & berat badan. Persyaratan anak tergolong stunting untuk pendataan dianggap PKK salah karena adanya faktor genetik dan adanya ibu hamil yang tidak memberikan gizi yang cukup. Respon orang tua yang tidak menerima anaknya stunting, orang tua yang mau anaknya stunting untuk mendapatkan bantuan, dan mengakibatkan konflik antara PKK dan orang tua anak karena tidak mau anaknya didampingi karena penyakit stunting.

PKK dalam melaksanakan sosialisasi mendapatkan hambatan karena SDM yang masih kurang. Masih ada sebagian tidak paham penyampaian sosialisasi karena orang tua tidak percaya dengan tenaga kesehatan. Pendataan yang lama, dan anggota PKK ada yang kurang aktif. Waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan jam kosong masyarakat sehingga ada beberapa masyarakat tidak bisa hadir.

Pada pelaksanaan PMT anggaran dana desa masih belum cukup untuk memenuhi bahan-bahan makanan selama satu periode terhadap anak-anak stunting di Bangsongan, sehingga perlunya penambahan anggaran. Sebelum adanya PMT, PKK memberikan bantuan sejumlah uang yang diharapkan orang tua mampu membeli kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan anak stunting ternyata hal ini menimbulkan penyalahgunaan BLT/Bansos. Terakhir, pada pelaksanaan demo memasak masih ada masyarakat yang tidak mau mengikuti panduan pembuatan makanan yang sehat.

PKK menjadikan program ini untuk menolong keluarga yang rentan miskin, orang tua yang tidak tahu pola asuh, dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan. Pemberdayaan menurut Suharto tidak akan berhasil apabila komunitas itu berdiri sendiri.



Adanya pemerintahan desa sebagai pembuat kebijakan yang berperspektif gender dalam pembuatan program dan mengalokasikan dana di periode 2023 mengalokasikan sebesar 60.000.000 juta rupiah kepada PKK dalam penurunan prevalensi stunting.

Kesimpulan

Pelaksanaan ini disesuaikan dengan standar gizi yang aman bagi anak balita sampai umur 5 tahun. Pembagian PMT dilakukan dalam dua kategori yaitu PMT PKK, dan PMT lokal desa. Program yang keempat adalah demo memasak melalui pemanfaatan bahan makanan yang ada dilingkungan dengan melakukan praktik memasak yang berkolaborasi dengan Rose Brand. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan edukasi praktik bagi keluarga yang terdampak stunting ataupun yang tidak terdampak stunting untuk mengikuti praktik pengolahan makanan yang disesuaikan dengan potensi desa. Pada akhirnya, PKK menghimbau para peserta untuk memanfaatkan kesempatan berjualan di UMKM Desa yang sudah disediakan.

Keberhasilan dari PKK adalah menurunkan angka stunting menjadi 11% sebagai tujuan dari pelaksanaan program selama tahun 2023. Anggaran dari dana desa menunjang jalannya kegiatan keterampilan yang dilaksanakan baik secara rutin dan tidak rutin. Partisipasi dari PEMDES, Tokoh Agama, dan masyarakat umum yang turut menghadiri, mengawasi, dan menginformasikan tentang stunting, adanya pihak ketiga (Rose Brand) sebagai mitra penyedia kegiatan dan donatur acara demo masak, pemberian fasilitas serta saran/prasarana, dukungan dari Puskesmas Desa yang selalu membantu dan turut hadir setiap kegiatan PKK, dan tentunya karena semangat dari PKK yang tidak pernah putus asa. Namun, adapun kegagalan kegiatan program stunting dari masyarakat yang tidak mengikuti dan tidak paham tentang stunting, tidak menjaga kebersihan



lingkungan, masih ada yang kurang berpartisipasi secara penuh, pola asuh yang salah, masih ada ibu hamil dan orang tua stunting yang tidak aktif, PKK juga terhambat karena anggaran dari PEMDES melalui dana desa belum cukup, dan PKK tidak diberikan uang logistik selama proses kegiatan ini berlangsung. Kegagalan lainnya yaitu belum maksimalnya peran puskesmas desa dalam mengedukasi kader PKK, mengikuti kegiatan PKK, dan tidak rutin hadir di setiap proses pelaksanaan posyandu yang seharusnya dibutuhkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.

Pemerintahan Desa menetapkan kebijakan penganggaran dana desa dalam mendukung secara stunting penanganan stunting terhadap PKK. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan selama mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemberdayaan karena dikatakan berhasil menerapkan kebijakan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Mengalokasikan dana desa untuk kebutuhan anak stunting yang memerlukan nutrisi yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2002). *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Agustin, D. R. (2020). *Cegah Stunting dengan Stimulasi dan Keragaman Pangan*. Malang: AE Publishing.
- Amin N.A & Julia, M. (2014). *Faktor Sosiologi demografi dan Tinggi Badan Orang Tua Serta Hubungannya dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 6 - 23 bulan*. No 2, Vol 5, Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia, 170.
- Ani W. Soetjipto, S. A. (2010). *Suara Dari Desa : Menuju Revitalisasi PKK*. Jakarta: Program studi yayanan gender dan yayanan TIFA.
- Basri. (1997). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Restu Agung.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2023, April 6). From BPS Provinsi Jawa Timur: <https://jatim.bps.go.id/>



- Cresswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- Dewi Sarah Simbolon, J. S. (2021). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*, No. 04, Vol. 03, Medan UPY Journal.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. (2023). *Pemantauan Posyandu Langsung Guna Menekan Angka Stunting*. Kediri: Dinas Kominfo Kab. Kediri. <https://diskominfo.kedirikab.go.id/>
- Ditjen Bina Adwil. (2024, Juli 1). From Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan: <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/>
- Husaini. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jovani, A. (2022). *Belajar Dari Desa: PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan*, No.1, Vol 4, Jurnal Umpo Aristo, 155.
- Kementerian Kesehatan. (2020). *Warta Kesmas*. Jakarta: kesmas,kemkes. https://kesmas.kemkes.go.id/kategori_konten/ec8956637a99787bd197eacd77acce5e/linked-in
- Kementrian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Kusumawati, E. R. (2015). *Model Pengendalian Faktor Risiko Stunting pada Anak Usia di Bawah Tiga Tahun*. Vol.2 No.2, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4.
- Marjuki, S. (1986). *Perubahan Sosial dan Perencanaan Sosial*. Bandung: STKS.
- Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Negeri, D. B. (2023). *Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi*. Jakarta: Ditjen Bangda.
- Nur Hafifah, Z. A. (2020). *Peran Posyandu Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak di desa Sukaweing, Kabupaten Bogor*. No. 3, Vol. 4, *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* ISSN 2721-897X, 896.
- Penurunan Stunting*. Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Perpres. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi*. Presiden Republik. Jakarta: Perpres.